

PENDIDIKAN KEASWAJAHAN DAN LITERASI DEMOKRASI DALAM MEMBENTUK SIKAP POLITIK INKLUSIF PEMILIH MUDA

Pandi Ahmad¹, Saiful Falah²

^{1,2}Universitas Islam Bogor

Email: pandiahmad9012@gmail.com¹, saifulfalah82@gmail.com²

Abstrak: Pemilih muda menempati posisi strategis dalam demokrasi Indonesia, tetapi peningkatan partisipasi politik mereka belum selalu diikuti kemampuan menilai informasi, menerima perbedaan pilihan, dan menolak mobilisasi politik berbasis kebencian. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan pendidikan keaswajaan dan literasi demokrasi dalam membentuk sikap politik inklusif pemilih muda. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber kajian terdiri atas artikel jurnal bereputasi dan terakreditasi, publikasi lembaga resmi, serta dokumen kepemiluan yang terbit pada 2021–2025. Data dianalisis melalui identifikasi konsep, pengodean tematik, perbandingan temuan, dan sintesis argumentatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan keaswajaan menyediakan fondasi etis melalui nilai tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal, dan ukhuwah, sedangkan literasi demokrasi memperkuat pengetahuan politik, evaluasi sumber, kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta kemampuan berdialog secara deliberatif. Integrasi keduanya membentuk empat kapasitas utama, yaitu penilaian informasi politik secara kritis, penerimaan terhadap pluralitas, penolakan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi politik yang damai dan bertanggung jawab. Model pembelajaran yang relevan mencakup studi kasus politik, analisis media, simulasi pemilu, diskusi deliberatif, dan proyek kewargaan nonpartisan. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan nilai keaswajaan sebagai etika kewargaan demokratis, bukan hanya sebagai doktrin keagamaan atau instrumen moderasi. Penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan keaswajaan dan literasi demokrasi perlu diintegrasikan dalam pendidikan politik pemilih muda. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan kurikulum, pendidikan pemilih, dan penguatan budaya demokrasi inklusif di perguruan tinggi, madrasah, pesantren, dan organisasi kepemudaan.

Kata kunci: Pendidikan Keaswajaan, Literasi Demokrasi, Sikap Politik Inklusif, Pemilih Muda, Pendidikan Politik.

Abstract: Young voters occupy a strategic position in Indonesian democracy, yet their growing political participation is not always accompanied by the ability to evaluate information, accept electoral differences, and reject hate-based political mobilisation. This study analyses the relationship between Aswaja education and democratic literacy in shaping inclusive political attitudes among young voters. It applies an integrative literature review using a qualitative descriptive approach. The sources include reputable and accredited journal articles, official institutional publications, and electoral documents published between 2021 and 2025. Data were analysed through concept identification, thematic coding, comparison of findings, and

argumentative synthesis. The review shows that Aswaja education provides an ethical foundation through the values of tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal, and ukhuwah, while democratic literacy strengthens political knowledge, source evaluation, awareness of civic rights and responsibilities, and deliberative dialogue skills. Their integration develops four central capacities: critical assessment of political information, acceptance of plurality, rejection of violence and discrimination, and peaceful and responsible political participation. Relevant learning practices include political case studies, media analysis, election simulations, deliberative discussions, and nonpartisan civic projects. The study's novelty lies in positioning Aswaja values as a framework for democratic citizenship ethics rather than merely a religious doctrine or an instrument of religious moderation. The study concludes that Aswaja education and democratic literacy should be integrated into political education for young voters. These findings have implications for curriculum development, voter education, and the strengthening of an inclusive democratic culture in universities, madrasas, pesantren, and youth organisations.

Keywords: *Aswaja Education, Democratic Literacy, Inclusive Political Attitudes, Young Voters, Political Education.*

PENDAHULUAN

Pemilih muda menjadi kelompok strategis dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum melaporkan bahwa sekitar 55% pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari generasi milenial dan Generasi Z, sehingga preferensi, kualitas penilaian, dan pola partisipasi kelompok ini berpengaruh besar terhadap legitimasi dan arah kebijakan politik nasional (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU RI], 2023). Posisi demografis tersebut perlu dibaca bersama karakter kehidupan pemuda yang semakin terhubung dengan internet, media sosial, dan jaringan komunikasi digital. Publikasi Statistik Pemuda Indonesia menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari aktivitas pendidikan, pekerjaan, interaksi sosial, dan akses pengetahuan generasi muda (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Kondisi ini membuka kesempatan bagi pemilih muda untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan membangun jejaring politik secara lebih luas.

Perluasan akses digital tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang rasional dan inklusif. Kajian global menunjukkan bahwa media digital dapat meningkatkan konsumsi informasi dan partisipasi politik, tetapi juga berkaitan dengan polarisasi, populisme, fragmentasi ruang publik, dan penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi (Lorenz-Spreen et al., 2023). Di Indonesia, media sosial telah memperluas keterlibatan pemuda dalam

isu publik dan gerakan sosial, tetapi pola partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kekuatan jejaring, kesamaan identitas, dan logika komunikasi platform (Saud & Margono, 2021; Saud et al., 2023). Pemilih muda dapat aktif membagikan konten politik tanpa memeriksa konteks, sumber, tujuan, dan konsekuensi sosialnya. Karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari jumlah partisipan, tetapi juga dari kemampuan warga mengelola perbedaan secara damai, berbasis bukti, dan sesuai prinsip kesetaraan.

Kerentanan pemilih muda semakin terlihat ketika kontestasi politik menggunakan pesan emosional, informasi negatif, simbol keagamaan, dan identitas kelompok. Eksperimen Carvalho et al. (2023) menunjukkan bahwa informasi politik dapat mengubah persepsi dan keputusan pemilih muda, terutama ketika pesan negatif membentuk penilaian terhadap kandidat. Studi mengenai pola bermedia Generasi Z di Indonesia juga menemukan bahwa media sosial menjadi sumber penting informasi politik dan kepemiluan, walaupun pemilihan kanal, bentuk konten, dan intensitas akses sangat beragam (Evita, 2023). Di sisi lain, observasi aktivitas politik orang lain di media sosial dapat mendorong partisipasi luring, tetapi pengaruhnya cenderung menguat dalam jaringan yang homogen secara politik (Kim & Ellison, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik harus membekali pemilih muda dengan kapasitas kritis sekaligus etika berinteraksi dalam masyarakat majemuk.

Literasi demokrasi dibutuhkan untuk menjembatani partisipasi dengan kualitas kewargaan. Dalam penelitian ini, literasi demokrasi dipahami sebagai kemampuan memahami prinsip, institusi, prosedur, hak, kewajiban, dan nilai demokrasi, serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk menilai informasi dan mengambil keputusan politik secara bertanggung jawab. Literasi ini tidak berhenti pada pengetahuan tentang pemilu. Literasi demokrasi mencakup evaluasi kredibilitas sumber, kesadaran terhadap manipulasi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, penerimaan terhadap kesetaraan politik, dan kemampuan berdialog dengan kelompok berbeda. Muringa dan Adjin-Tettey (2024) menemukan bahwa literasi media memperkuat pengetahuan politik, pemikiran kritis, dan keterlibatan demokratis mahasiswa. Intervensi literasi yang mengenalkan teknik manipulasi juga terbukti meningkatkan ketahanan pengguna media sosial terhadap misinformasi (Roozenbeek et al., 2022).

Namun, kecakapan kognitif saja belum cukup. Pemilih dapat memahami prosedur demokrasi tetapi tetap menggunakan pengetahuan tersebut untuk membenarkan eksklusi,

kebencian, atau dominasi kelompok. Demokrasi membutuhkan fondasi moral yang menempatkan lawan politik sebagai warga negara yang memiliki martabat dan hak yang setara. Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, pendidikan keaswajaan menyediakan sumber etik yang relevan melalui tawassuth atau sikap tengah, tasamuh atau toleransi, tawazun atau keseimbangan, i'tidal atau keadilan, serta ukhuwah atau persaudaraan sosial. Nilai tersebut membentuk kerangka keberagamaan yang tidak mudah menghakimi, tidak ekstrem, dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa internalisasi nilai keaswajaan dapat memperkuat toleransi, karakter moderat, dan penerimaan terhadap perbedaan. Orientasi pendidikan agama yang inklusif dan berwawasan kewargaan juga menempatkan moderasi sebagai dasar hubungan antara identitas keagamaan, tanggung jawab sosial, dan kewargaan global (Daheri, 2022). Pada konteks pesantren, penguatan nilai moderasi melalui pembelajaran, keteladanan, dan budaya kelembagaan menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat diterjemahkan menjadi perilaku sosial yang terukur (Zakariyah et al., 2022). Ashoumi et al. (2023) menemukan bahwa perencanaan pembelajaran, pembelajaran konstruktif, tugas lapangan, dan evaluasi pada mata kuliah Aswaja mendukung pembentukan toleransi mahasiswa. Latif et al. (2023) menegaskan bahwa penanaman tawassuth, tawazun, dan tasamuh melalui pembelajaran dan budaya lembaga memperkuat moderasi beragama peserta didik. Ikhsan et al. (2024) memperluas temuan tersebut dengan menghubungkan nilai Aswaja An-Nahdliyah dengan pengajaran kewargaan pada sekolah yang terintegrasi dengan pesantren. Pendidikan agama yang moderat juga dapat dibangun melalui kurikulum, pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan institusional (Anwar & Muhayati, 2021).

Walaupun demikian, penelitian keaswajaan masih lebih banyak berfokus pada toleransi keagamaan, moderasi beragama, pencegahan radikalisme, dan pembentukan karakter. Sementara itu, penelitian tentang pemilih muda lebih sering membahas partisipasi, penggunaan media sosial, preferensi politik, dan aktivisme digital (Ida et al., 2025; Mustofa et al., 2024; Wahyuningroem et al., 2024). Kedua rumpun kajian tersebut belum banyak dipertemukan dalam satu kerangka yang menjelaskan bagaimana nilai keaswajaan berinteraksi dengan literasi demokrasi untuk membentuk orientasi politik inklusif. Kesenjangan ini penting karena pendidikan keagamaan dan pendidikan politik sering berjalan terpisah. Akibatnya, materi keaswajaan berisiko tetap normatif, sedangkan literasi demokrasi berisiko menjadi prosedural

dan kurang berakar pada etika sosial-keagamaan peserta didik.

Permasalahan penelitian ini terletak pada belum tersedianya kerangka integratif yang menempatkan pendidikan keaswajaan sebagai etika kewargaan demokratis dan literasi demokrasi sebagai kompetensi politik kritis. Sikap politik inklusif dalam penelitian ini merujuk pada kesediaan menerima kesetaraan hak politik, menghormati perbedaan pilihan, menolak kekerasan dan diskriminasi, membuka ruang dialog, serta berpartisipasi secara damai dan bertanggung jawab. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian bertujuan menganalisis kontribusi konseptual pendidikan keaswajaan dan literasi demokrasi terhadap pembentukan sikap politik inklusif pemilih muda, mengidentifikasi dimensi integrasi keduanya, dan merumuskan model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan tinggi, madrasah, pesantren, serta organisasi kepemudaan. Penelitian diharapkan memperluas kajian pendidikan Islam menuju ranah kewargaan demokratis dan memberikan dasar bagi pengembangan pendidikan pemilih yang kritis, etis, kontekstual, serta nonpartisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian literatur integratif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pilihan metode didasarkan pada tujuan penelitian untuk menghubungkan dua rumpun pengetahuan yang selama ini berkembang relatif terpisah, yaitu pendidikan keaswajaan dan literasi demokrasi. Kajian integratif memungkinkan peneliti membandingkan temuan empiris, menelaah konstruksi konseptual, dan menyusun model argumentatif tanpa mengklaim adanya hubungan kausal berbasis data lapangan. Unit analisis penelitian berupa artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen kepemiluan yang membahas nilai keaswajaan, moderasi, kewargaan, literasi media atau demokrasi, partisipasi politik, pemilih muda, disinformasi, dan politik digital.

Penelusuran sumber dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, Crossref, laman penerbit jurnal, serta portal resmi BPS dan KPU. Kata kunci yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris meliputi “pendidikan keaswajaan”, “nilai Aswaja”, “literasi demokrasi”, “literasi media”, “pemilih muda”, “partisipasi politik pemuda”, “inclusive political attitudes”, “young voters”, “digital democracy”, dan “political misinformation”. Sumber dipilih berdasarkan empat kriteria: terbit pada 2021–2025, relevan langsung dengan fokus kajian, berasal dari jurnal ilmiah bereputasi atau terakreditasi maupun lembaga resmi, serta memiliki DOI atau tautan penerbit resmi yang dapat diverifikasi. Sumber yang hanya membahas politik

umum tanpa kaitan dengan pendidikan, pemuda, literasi, atau inklusivitas tidak digunakan sebagai rujukan inti.

Analisis dilaksanakan dalam empat tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep utama dan temuan setiap sumber. Kedua, temuan diberi kode berdasarkan tema nilai keaswajaan, kompetensi literasi demokrasi, karakter pemilih muda, risiko politik digital, dan indikator sikap politik inklusif. Ketiga, kode dibandingkan untuk menemukan konvergensi, perbedaan, dan hubungan antarkonsep. Keempat, hasil perbandingan disintesis menjadi kerangka integratif yang menjelaskan mekanisme pendidikan, bentuk kompetensi, strategi pembelajaran, dan keluaran sikap politik. Kredibilitas analisis dijaga melalui pemeriksaan silang antara artikel nasional, artikel internasional, dan dokumen resmi, serta konsistensi antara rumusan masalah, temuan sintesis, dan kesimpulan. Karena penelitian tidak melibatkan partisipan manusia atau pengumpulan data personal, persetujuan etik penelitian lapangan tidak diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Keaswajaan sebagai Fondasi Etika Kewargaan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendidikan keaswajaan memiliki potensi untuk bergerak dari pengajaran doktrin menuju pendidikan etika kewargaan. Tawassuth membentuk kecenderungan menghindari ekstremitas dan penilaian hitam-putih. Dalam ruang politik, nilai ini mendorong pemilih untuk menilai program, rekam jejak, dan argumen secara proporsional, bukan sekadar mengikuti loyalitas kelompok. Tasamuh memperkuat penerimaan terhadap perbedaan pilihan dan identitas. Nilai ini tidak menuntut persetujuan terhadap seluruh pandangan, tetapi menuntut penghormatan terhadap hak pihak lain untuk berpendapat dan berpartisipasi.

Tawazun memberikan prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, serta antara loyalitas kelompok dan komitmen kebangsaan. I'tidal menempatkan keadilan sebagai dasar penilaian politik. Pemilih yang menginternalisasi i'tidal tidak membenarkan diskriminasi hanya karena perbedaan agama, etnis, organisasi, atau pilihan kandidat. Ukhuwah memperluas orientasi persaudaraan dari komunitas internal menuju relasi sosial dan kebangsaan. Dalam kerangka tersebut, kompetisi politik dipahami sebagai mekanisme demokratis, bukan alasan untuk memutus hubungan sosial.

Temuan ini selaras dengan Ashoumi et al. (2023), yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi melalui mata kuliah Aswaja dapat menghasilkan pemahaman terhadap perbedaan pendapat dan toleransi mahasiswa. Latif et al. (2023) juga menegaskan fungsi pembelajaran dan budaya lembaga dalam menanamkan tawassuth, tawazun, serta tasamuh. Ikhsan et al. (2024) menunjukkan bahwa nilai Aswaja dapat dihubungkan dengan pengajaran kewargaan, sehingga keaswajaan tidak harus berhenti pada dimensi ritual dan identitas organisasi. Sintesis penelitian ini memperluas arah tersebut dengan menempatkan nilai keaswajaan sebagai seperangkat prinsip untuk menilai informasi, berinteraksi dengan lawan politik, dan mengambil keputusan sebagai warga negara.

Tabel 1. Pemetaan Nilai Keaswajaan dan Indikator Sikap Politik Inklusif

Nilai keaswajaan	Makna pendidikan	Aktualisasi politik	Indikator inklusivitas
Tawassuth	Sikap tengah dan tidak ekstrem	Menilai kandidat dan isu secara proporsional	Tidak mudah terprovokasi; menolak fanatisme
Tasamuh	Menghargai perbedaan	Menerima pilihan dan ekspresi politik yang sah	Kesediaan berdialog; tidak mendiskriminasi
Tawazun	Keseimbangan hak dan tanggung jawab	Menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan dampak sosial	Berpendapat tanpa ujaran kebencian
I'tidal	Keadilan dan objektivitas	Mengakui kesetaraan hak politik setiap warga	Menolak kekerasan, intimidasi, dan manipulasi
Ukhuwah	Persaudaraan sosial dan kebangsaan	Menjaga relasi sosial setelah kontestasi	Mengutamakan perdamaian dan kemaslahatan

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Ashoumi et al. (2023), Latif et al. (2023), dan Ikhsan et al. (2024).

2. Literasi Demokrasi sebagai Kompetensi Politik Kritis

Literasi demokrasi berfungsi sebagai perangkat kognitif dan praksis yang memungkinkan pemilih muda mengubah akses informasi menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan literatur memperlihatkan sedikitnya lima dimensi utama. Pertama, pengetahuan institusional, yaitu pemahaman tentang pemilu, lembaga negara, representasi, hak politik, dan mekanisme akuntabilitas. Kedua, literasi informasi, yaitu kemampuan mengidentifikasi sumber, memeriksa bukti, membedakan fakta dan opini, serta mengenali teknik manipulasi. Ketiga, kemampuan deliberatif, yaitu menyampaikan alasan, mendengar argumen, dan merevisi pendapat ketika berhadapan dengan bukti yang lebih kuat. Keempat, kesadaran pluralitas, yaitu penerimaan terhadap kesetaraan warga dan legitimasi perbedaan. Kelima, efikasi kewargaan, yaitu keyakinan bahwa partisipasi dapat dilakukan secara legal, damai, dan bermakna.

Muringa dan Adjin-Tettey (2024) menemukan bahwa literasi media meningkatkan pengetahuan politik, analisis kritis, dan keterlibatan demokratis mahasiswa. Roozenbeek et al. (2022) menunjukkan bahwa pengenalan terhadap teknik manipulasi dapat memperkuat ketahanan terhadap misinformasi. Temuan Carvalho et al. (2023) memperlihatkan bahwa informasi memengaruhi persepsi dan perilaku elektoral pemilih muda, sehingga proses pendidikan harus memperhatikan bentuk, sumber, dan framing pesan politik. Dalam konteks Indonesia, Evita (2023) mengidentifikasi media sosial sebagai salah satu kanal utama pencarian informasi politik Generasi Z. Karena itu, literasi demokrasi perlu menggabungkan pengetahuan kepemiluan dengan literasi media digital.

Literasi demokrasi juga perlu menghindari dua reduksi. Pertama, reduksi prosedural yang mengukur warga hanya dari kehadiran pada pemungutan suara. Kedua, reduksi teknis yang menyamakan literasi dengan kemampuan menggunakan aplikasi atau mencari informasi. Pemilih yang inklusif harus mampu mempertanyakan kepentingan di balik pesan, mengenali dampak sosial penyebaran konten, dan mempertimbangkan hak kelompok yang berbeda. Di titik ini, literasi demokrasi membutuhkan nilai etik. Pendidikan keaswajaan mengisi kebutuhan tersebut dengan prinsip moderasi, toleransi, keseimbangan, keadilan, dan persaudaraan.

3. Pemilih Muda dalam Ekosistem Politik Digital

Pemilih muda hidup dalam ekosistem politik yang ditandai oleh arus informasi cepat, komunikasi visual, keterlibatan berbasis jejaring, dan algoritma personalisasi. Saud dan

Margono (2021) menunjukkan bahwa media digital telah mengubah struktur partisipasi politik pemuda Indonesia. Saud et al. (2023) menegaskan bahwa ruang digital membuka peluang bagi keterlibatan sipil, pembentukan jaringan, dan ekspresi isu publik. Ida et al. (2025) juga menemukan bahwa jaringan sosial dan ikatan sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda. Namun, keterlibatan yang tinggi tidak selalu identik dengan keterbukaan terhadap perbedaan.

Algoritma platform dapat memperkuat paparan terhadap konten yang serupa dengan preferensi pengguna. Kim dan Ellison (2022) menunjukkan bahwa hubungan antara observasi politik di media sosial dan partisipasi menguat dalam jaringan yang homogen. Kondisi ini dapat menghasilkan ruang gema yang memperkuat keyakinan kelompok dan mempersempit kontak dengan argumen berbeda. Kajian Lorenz-Spreen et al. (2023) juga menunjukkan bahwa media digital memiliki dampak demokratis yang ambivalen. Media dapat meningkatkan partisipasi dan akses informasi, tetapi sekaligus mendorong polarisasi serta menurunkan kepercayaan politik.

Di Indonesia, aktivisme digital pemuda menunjukkan kapasitas mobilisasi yang kuat. Gerakan berbasis tagar dapat menghubungkan diskusi daring dengan aksi kolektif luring (Wahyuningroem et al., 2024). Mustofa et al. (2024) menilai media sosial sebagai sarana e-democracy yang membuka ruang partisipasi, walaupun masih menghadapi kesenjangan akses, rendahnya minat politik, risiko ujaran kebencian, dan problem regulasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan pemilih tidak boleh memusuhi teknologi. Pendidikan perlu mengarahkan teknologi menuju partisipasi berbasis bukti, dialog, pengawasan kebijakan, dan penghormatan terhadap hak warga.

4. Model Integrasi Pendidikan Keaswajaan dan Literasi Demokrasi

Integrasi pendidikan keaswajaan dan literasi demokrasi dapat dirumuskan dalam tiga lapis pembelajaran. Lapis pertama ialah fondasi nilai. Peserta didik memahami tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal, dan ukhuwah bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kriteria untuk menilai tindakan politik. Lapis kedua ialah kompetensi demokratis. Peserta didik mempelajari lembaga politik, hak warga, verifikasi informasi, argumentasi, dan etika komunikasi. Lapis ketiga ialah pengalaman praksis. Peserta didik menerapkan nilai dan kompetensi melalui analisis kasus, diskusi, simulasi, dan proyek kewargaan.

Model tersebut menempatkan pembelajaran sebagai proses yang aktif. Studi kasus dapat menggunakan isu disinformasi, politik identitas, ujaran kebencian, kampanye negatif, konflik pascapemilu, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Analisis media dapat meminta peserta didik membandingkan berita, menelusuri sumber, mengidentifikasi framing, dan menilai bukti. Simulasi pemilu dapat melatih penyusunan program, debat, kampanye etis, pemungutan suara, pengawasan, dan penerimaan hasil. Diskusi deliberatif dapat melatih kemampuan menyampaikan alasan dan mendengar pandangan berbeda. Proyek kewargaan dapat diarahkan pada pendidikan pemilih, kampanye antidis informasi, forum lintas komunitas, atau pemantauan kebijakan lokal.

Evaluasi pembelajaran perlu mengukur perubahan pengetahuan, penalaran, sikap, dan perilaku. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang demokrasi dan nilai keaswajaan. Penalaran mencakup kemampuan memeriksa sumber dan menyusun argumen. Sikap mencakup penerimaan terhadap perbedaan dan kesetaraan hak. Perilaku mencakup cara berkomunikasi, berbagi informasi, mengikuti kegiatan politik, dan merespons hasil pemilu. Evaluasi berbasis portofolio, rubrik argumentasi, jurnal reflektif, dan observasi proyek lebih sesuai dibandingkan tes hafalan semata.

Tabel 2. Desain Pembelajaran Integratif untuk Pemilih Muda

Komponen	Materi inti	Strategi belajar	Produk belajar	Indikator capaian
Fondasi etik	Tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal, ukhuwah	Refleksi nilai dan studi dilema	Esai etika politik	Mampu memberi alasan etis
Pengetahuan demokrasi	Pemilu, lembaga, hak dan kewajiban	Peta konsep dan simulasi	Peta institusi dan prosedur	Memahami proses dan hak politik
Literasi informasi	Sumber, bukti, framing, misinformasi	Analisis media dan cek fakta	Laporan verifikasi	Membedakan fakta, opini, dan manipulasi

Komponen	Materi inti	Strategi belajar	Produk belajar	Indikator capaian
Kemampuan deliberatif	Argumentasi dan dialog	Debat terstruktur dan forum	Notula deliberasi	Menghormati lawan dan merevisi pendapat
Praksis kewargaan	Partisipasi damai dan nonpartisan	Proyek pendidikan pemilih	Kampanye publik	Berpartisipasi tanpa diskriminasi

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan sintesis hasil kajian, 2025.

5. Kebaruan dan Implikasi Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran posisi pendidikan keaswajaan dari kerangka moderasi keagamaan menuju kerangka etika kewargaan demokratis. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan keaswajaan dengan toleransi, moderasi, dan karakter, tetapi belum secara sistematis menghubungkannya dengan kompetensi evaluasi informasi, deliberasi, keputusan elektoral, dan penerimaan hasil politik. Sintesis ini menawarkan konsep bahwa sikap politik inklusif terbentuk melalui interaksi antara nilai etik dan kecakapan demokratis. Nilai tanpa kecakapan dapat menghasilkan sikap normatif yang tidak mampu menghadapi manipulasi informasi. Sebaliknya, kecakapan tanpa nilai dapat menghasilkan warga yang terampil tetapi tidak berkomitmen pada kesetaraan dan kemanusiaan.

Secara teoretis, model ini memperluas kajian pendidikan Islam, pendidikan kewarganegaraan, dan komunikasi politik. Pendidikan Islam memperoleh ruang analisis baru untuk menjelaskan perilaku warga dalam kontestasi demokratis. Pendidikan kewarganegaraan memperoleh basis nilai yang berakar pada tradisi sosial-keagamaan Indonesia. Komunikasi politik memperoleh kerangka pedagogis yang menghubungkan literasi media dengan etika dialog. Secara praktis, model dapat digunakan oleh perguruan tinggi, pesantren, madrasah, KPU, organisasi keagamaan, dan organisasi pemuda untuk menyusun pendidikan pemilih yang tidak mengarahkan pilihan kepada kandidat tertentu.

Implementasi model memerlukan kehati-hatian agar pendidikan keaswajaan tidak berubah menjadi legitimasi politik partisan. Materi harus berfokus pada nilai, prosedur, hak

warga, evaluasi informasi, dan kemampuan dialog. Pengajar perlu menghadirkan kasus dari berbagai posisi politik, menggunakan sumber yang dapat diverifikasi, dan memberi ruang aman untuk perbedaan. Institusi juga perlu menyusun indikator keberhasilan yang dapat diukur, termasuk penurunan kecenderungan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, peningkatan kesediaan berinteraksi dengan kelompok berbeda, dan penguatan partisipasi damai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan keaswajaan dan literasi demokrasi memiliki kontribusi konseptual yang saling melengkapi dalam membentuk sikap politik inklusif pemilih muda. Pendidikan keaswajaan menyediakan fondasi etis melalui nilai tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal, dan ukhuwah, sedangkan literasi demokrasi memperkuat kemampuan memahami hak dan kewajiban politik, menilai informasi secara kritis, menghargai kesetaraan warga negara, serta menerima perbedaan pilihan. Integrasi kedua aspek tersebut mendorong orientasi politik yang menolak ujaran kebencian, kekerasan, diskriminasi, fanatisme kelompok, dan manipulasi agama dalam kontestasi demokratis. Kebaruan utama penelitian terletak pada pengembangan kerangka integratif yang menempatkan pendidikan keaswajaan bukan hanya sebagai instrumen pembentukan moderasi keagamaan, tetapi sebagai basis etika kewargaan yang dapat dioperasionalkan dalam pendidikan politik pemilih muda. Kerangka ini memperluas kajian keaswajaan dari wilayah normatif-teologis menuju ranah perilaku politik demokratis dan memperkaya literasi demokrasi melalui integrasi nilai Islam moderat yang kontekstual dengan masyarakat Indonesia. Secara ilmiah, temuan memperkuat argumentasi bahwa sikap politik inklusif tidak cukup dibentuk melalui pengetahuan prosedural, tetapi memerlukan internalisasi nilai moral, kemampuan deliberatif, kecakapan evaluasi informasi, dan pengalaman berinteraksi dengan kelompok berbeda. Implikasi praktisnya, perguruan tinggi, madrasah, pesantren, penyelenggara pemilu, dan organisasi kepemudaan perlu merancang pendidikan politik nonpartisan melalui studi kasus, analisis disinformasi, simulasi pemilu, diskusi deliberatif, dan proyek kewargaan berbasis nilai keaswajaan. Penelitian lanjutan perlu menguji model ini melalui survei, eksperimen, desain longitudinal, atau mixed methods pada wilayah dan kelompok sosial yang beragam. Kajian berikutnya juga perlu menelaah peran mediasi literasi media, efikasi politik, identitas keagamaan, kontak antarkelompok, dan intensitas penggunaan media sosial dalam hubungan

antara pendidikan keaswajaan dan sikap politik inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.7717>
- Ashoumi, H., Hidayatulloh, M. K. Y., Hasanah, S. D., & Umami, F. N. (2023). Student tolerance through religious moderation values in Aswaja courses. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v14i1.13593>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pemuda Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Carvalho, B. P., Custódio, C., Geys, B., Mendes, D., & Peralta, S. (2023). Information, perceptions, and electoral behaviour of young voters: A randomised controlled experiment. *Electoral Studies*, 84, Article 102625. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102625>
- Daheri, M. (2022). Religious moderation, inclusive, and global citizenship as new directions for Islamic religious education in madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 64–77. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.1853>
- Evita, N. (2023). Generasi Z dalam pemilu: Pola bermedia Generasi Z dalam pencarian informasi politik. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 47–66. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1051>
- Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: Democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1), Article 2432071. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>
- Ikhsan, M. A., Marzuki, Suharno, Anam, F. K., Muzdalifah, Z., & Arawindha, U. (2024). The new concept of Aswaja An-Nahdliyah values: An investigation of religious moderation and citizenship teaching in pesantren-integrated schools. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 8(2), 123–135. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2024.008.02.1>
- Kim, D. H., & Ellison, N. B. (2022). From observation on social media to offline political participation: The social media affordances approach. *New Media & Society*, 24(12), 2614–2634. <https://doi.org/10.1177/1461444821998346>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *55% pemilih didominasi generasi muda*,

- bantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024*. KPU RI.
- Latif, A., Ubaidillah, & Mundir. (2023). Embedding Aswaja values in strengthening religious moderation in students. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 601–609. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.521>
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2023). A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. *Nature Human Behaviour*, 7(1), 74–101. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1>
- Muringa, T., & Adjin-Tetty, T. D. (2024). Media literacy's role in democratic engagement and societal transformation among university students. *African Journalism Studies*, 45(2), 115–134. <https://doi.org/10.1080/23743670.2024.2424902>
- Mustofa, M. U., Utama, R. S., & Andalus, M. K. (2024). E-democracy in Indonesia: Use of social media and challenges in encouraging youth political participation. *JWP: Jurnal Wacana Politik*, 9(1), 102–111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i1.52775>
- Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. *Science Advances*, 8(34), Article eabo6254. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Saud, M., Ida, R., Mashud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *International Journal of Intercultural Relations*, 97, Article 101904. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101904>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: The case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, Article 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>
- Zakariyah, Z., Fauziyah, U., & Kholis, M. M. N. (2022). Strengthening the value of religious moderation in Islamic boarding schools. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 3(1), 20–39. <https://doi.org/10.31538/tijie.v3i1.104>